

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang menjembatani terwujudnya perekonomian yang lebih maju. Pembangunan ekonomi merupakan proses kegiatan yang dilakukan suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional dan pemberantasan kemiskinan.<sup>2</sup> Pembangunan ekonomi terus dialami oleh berbagai negara terutama negara berkembang seperti Indonesia.

Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, pembangunan ekonomi di Jawa Timur memiliki peran yang sangat penting. Dengan jumlah penduduk yang besar, Jawa Timur menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu permasalahan yang mendasar, dimana pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Christie Frisdiantara and Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis Dan Empiris* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), hal. 2.

<sup>3</sup> Fadillah, Puti Andiny, and Rinaldi Syahputra, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Distribusi Pendapatan Di Aceh Bagian Timur,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, vol. 7, no. 2 (2023): hal. 87, <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i2.8907>.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk di Provinsi di Indonesia tahun 2024  
(Ribu Jiwa)**

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk (Juta)
1.	Jawa Barat	50.342,2
2.	Jawa Timur	41.814,5
3.	Jawa Tengah	37.892,3
4.	Sumatra Utara	15.588,5
5.	Banten	12.431,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Seperti yang tercantum pada data di atas, Jawa Timur menempati posisi ke-2 jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 41,8 Juta jiwa. Adanya populasi penduduk yang besar ini sebenarnya tidak akan memicu masalah apabila masyarakat memiliki produktivitas yang tinggi. Namun, masalah pembangunan ini akan muncul apabila sistem persebaran penduduk dan pergerakan tenaga kerja yang kurang seimbang antar daerah sehingga timbul masalah ketimpangan antar daerah. Ukuran ketimpangan suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Gini sebagai derajat pengukuran ketidakmerataan distribusi pendapatan suatu daerah.<sup>4</sup>

**Tabel 1. 2 Indeks Gini Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023**

Tahun	Indeks Gini (Persen)
2019	0,370
2020	0,366
2021	0,374
2022	0,371
2023	0,387

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

---

<sup>4</sup> Monika Refiana Nurfadila, Putroue Keumala Intan, "Identifikasi Faktor-Faktor Pengaruh Indeks Gini Ratio Menggunakan Regresi Logistik Ordinal," *Jurnal Ilmiah Matematika Dan Terapan*, vol. 20, no. 1 (2023): hal. 38, <https://doi.org/10.22487/2540766x.2023.v20.i1.16258>.

Berdasarkan data pada tabel 1.2, indeks gini Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Indeks gini yang semakin mendekati 1 (satu) maka derajat ketimpangan suatu daerah semakin besar. Dalam tabel tersebut, Indeks gini tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang mencapai 0,387. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Jawa Timur relatif tinggi. Tingginya tingkat ketimpangan ini menunjukkan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan antar daerah dengan tingkat ekonomi yang tinggi dan daerah dengan tingkat ekonomi rendah.

Ketimpangan antar daerah ini tidak terjadi begitu saja. pada awal proses pembangunan di suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Ketimpangan ini terus berlanjut hingga mencapai titik puncak. Kemudian, apabila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah akan menurun. Berdasarkan teori ini, adanya modal dan tenaga kerja pada permulaan proses pembangunan adalah relatif kurang lancar, sehingga modal dan tenaga ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju dan ketimpangan pembangunan wilayah cenderung melebar.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, ada beberapa indikator yang menyebabkan terjadinya ketimpangan, antara lain tingkat kesejahteraan individu,

---

<sup>5</sup> Musyrifah Musyrifah et al., "Pengaruh Pdrb, Investasi, Dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Pembangunan* 2, no. 1 (2024): hal. 50.

ketersediaan sarana prasarana, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pola dan konsentrasi penyebaran investasi.<sup>6</sup> Berdasarkan indikator-indikator tersebut, infrastruktur dalam hal ini termasuk dalam sarana prasana merupakan salah satu indikator ketimpangan suatu daerah. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur dapat berdampak pada biaya produksi yang besar pada daerah yang minim infrastruktur. Akibatnya, perekonomian daerah menjadi tidak efisien.<sup>7</sup>

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang menghubungkan banyak daerah dengan pusat bisnis perlu diprioritaskan oleh pemerintah.<sup>8</sup> Upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dalam realisasi anggaran belanja modal yang dikeluarkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja modal pemerintah meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya. Belanja modal ini dapat digunakan pemerintah untuk memperoleh aset tetap seperti infrastruktur.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Sulfadli, *Disparitas Pembangunan Ekonomi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021) hal 63.

<sup>7</sup> Frisdiantara, Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis Dan Empiris*, hal. 38.

<sup>8</sup> Fitri Amalia, dkk., *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hal. 222.

<sup>9</sup> Intan Lidia Putri, Vivi, “Realisasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Sambas,” *Sosiosaintika*, vol. 2, no. 1 (2024): hal. 32, <https://doi.org/10.59996/sosiosaintika.v2i1.387>.

**Tabel 1. 3 Realisasi Belanja Modal Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023.**

<b>Tahun</b>	<b>Realiasai Belanja Modal (Triliun Rupiah)</b>
2019	21,11
2020	157,57
2021	167,35
2022	195,10
2023	17,89

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, realisasi belanja modal provinsi jawa timur mengalami penurunan pada tahun 2023 dimana sebelumnya terjadi kenaikan berurut-urut pada tahun 2019 hingga 2022. Hal ini menunjukkan adanya penurunan pembiayaan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah. Suatu daerah yang memiliki infrastruktur yang baik dan memadai akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, mobilitas barang dan jasa, serta distribusi produksi untuk meningkatkan produktivitas daerah. Berdasarkan penelitian Ni Luh dan Ni Nyoman, semakin tinggi biaya pembangunan infrastruktur maka semakin rendah ketimpangan di suatu daerah.<sup>10</sup>

Selain peningkatan produktivitas daerah, adanya pembangunan infrastruktur juga mendorong peningkatan investasi. Investasi menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi ketimpangan suatu daerah. Investasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta.

---

<sup>10</sup> Ni Luh Gde Mitha Ardiyanti and Ni Nyoman Reni Suasih, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Investasi, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 12, no. 7 (2023): hal. 516, <https://doi.org/10.24843/eep.2023.v12.i07.p04>.

Namun investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta ini dapat mengakibatkan adanya ketimpangan apabila investasi hanya terpusat pada satu daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Myrdal bahwa daerah yang sudah maju merangsang investasi yang terus menerus berpusat pada daerah tersebut sehingga muncul daerah tertinggal yang menyebabkan semakin besarnya jurang kesenjangan antar daerah.<sup>11</sup>

**Tabel 1. 4 Realisasi Investasi Jawa Timur Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Investasi (Triliun Rupiah)</b>
2019	Rp. 58,45
2020	Rp. 78,30
2021	Rp. 79,50
2022	Rp. 110,30
2023	Rp. 145,10

Sumber: DTMPTSP Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, Realisasi Investasi Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dimana realisasi investasi mencapai Rp. 145,10 Trilyun. Berdasarkan laporan kinerja penanaman modal Provinsi Jawa Timur tahun 2023, investasi terbesar berada di Kabupaten Gresik dengan investasi sebesar Rp. 49,5 Trilyun atau 34,1% dari total investasi Jawa Timur disusul dengan Kota Surabaya dengan nilai Rp. 23,3 Trilyun atau 16% dari total Investasi Jawa Timur.<sup>12</sup> Berdasarkan penelitian Kurniati, investasi dilihat dari nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri

<sup>11</sup> M.L. Jhingan, *The Economics Of Development And Planning*, 40th ed. (Delhi: Vrinda Publication, 2012), chap. 33.

<sup>12</sup> DTMPTSP Jawa Timur, “Laporan Kinerja Penanaman Modal Tahun 2023,” <https://dpmptsp.jatimprov.go.id/> diakses 5 Desember 2024.

(PMDN) mengurangi ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>13</sup>

Pengadaan infrastruktur dan Investasi harus disertai dengan adanya modal manusia. Todaro berpendapat bahwa modal manusia dapat diukur melalui tingkat pendidikan dan kesehatan. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan kunci bagi negara berkembang dalam menyerap teknologi dan mengembangkan keterampilan.<sup>14</sup> Berdasarkan penilitian Nabila, pendidikan seorang tinggi, maka produktivitas semakin tinggi dan memungkinkan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>15</sup>

**Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
2019	39.698.631	7,34
2020	40.665.696	7,78
2021	40.878.789	7,88
2022	41.149.974	8,03
2023	41.814.407	8,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

<sup>13</sup> Kurniati Mansyur, Nursini, and Hamrullah, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sulawesi,” *Development Policy and Management Review (DPMR)* 1, no. 2 (2021): hal. 103–5, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/>.

<sup>14</sup> Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (United State of America: Pearson, 2015), hal. 359.

<sup>15</sup> Nabila Dewi Putri, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Desentralisasi Fiskal, Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan” 3, no. 4 (2024): hal. 1302.

Berdasarkan tabel 1.4, terlihat adanya kenaikan jumlah penduduk dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Timur. Kenaikan Jumlah penduduk yang signifikan ini hanya diiringi kenaikan rata-rata lama sekolah yang relatif lambat dengan rata-rata tertinggi 8,11 tahun pada tahun 2023. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah dalam Pasal 1 ayat 22 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menjelaskan bahwa program pendidikan paling rendah 12 (dua belas) tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat Jawa Timur atas tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>16</sup> Dalam hal ini taraf pendidikan yang rendah akan mengakibatkan rendahnya produktivitas suatu daerah sehingga pembangunan ekonomi menjadi terhambat.

Selain pendidikan, salah satu indikator ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah adalah akses kesehatan. Todaro mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan.<sup>17</sup> Pada penelitian terdahulu oleh Nineng dkk., tingkat kesehatan penduduk yang rendah dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan kesehatan seseorang akan berdampak langsung pada kegiatan sehari-harinya, mereka tidak dapat melakukan aktivitas yang akan menambah pendapatannya.<sup>18</sup> Salah satu indikator untuk

---

<sup>16</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Timur, “Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan,” <https://dokumjdih.jatimprov.go.id/> diakses 6 Desember 2024.

<sup>17</sup> Todaro dan Smith, *Economic Developement*, hal. 365.

<sup>18</sup> Nineng Noer Laila, Sri Indriyani S. Dai, Syarwani Canon, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Perkapita, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

mengukur tingkat kesehatan penduduk yaitu melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup.

**Tabel 1. 6 Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Timur**

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta)	Angka Harapan Hidup (Tahun)
2019	39.698.631	71,18
2020	40.665.696	71,30
2021	40.878.789	71,30
2022	41.149.974	71,74
2023	41.814.407	72,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tabel data di atas, Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan beriringan dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dimana angka harapan hidup masyarakat mencapai 72 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Jawa Timur menunjukkan peningkatan. Namun hal ini tidak diiringi dengan kondisi ketimpangan yang terjadi merujuk pada tabel 1.2 dimana indeks gini Provinsi Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Peristiwa ini mengakibatkan Gap atau kesenjangan semakin lebar.

. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Kenaikan jumlah penduduk selalu diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja. Lonjakan jumlah tenaga kerja ini apabila tidak diikuti dengan lapangan pekerjaan yang memadai maka akan menimbulkan masalah pengangguran. Di samping itu, dalam hipotesis

Neo-Klasik, mobilitas modal dan tenaga kerja pada permulaan pembangunan memang kurang lancar sehingga modal dan tenaga kerja cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju dan ketimpangan pembangunan wilayah cenderung melebar.<sup>19</sup>

**Tabel 1. 7 Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, dan TPAK Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta)	Angkatan Kerja (Juta)	TPAK
2019	39.698.631	21.499.386	69,45%
2020	40.665.696	22.264.112	70,33%
2021	40.878.789	22.319.142	70,00%
2022	41.149.974	22.869.012	71,23%
2023	41.814.407	23.895.175	72,56%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel 1.6 di atas, dapat dilihat bahwa ada kenaikan jumlah angkatan kerja seiring bertambahnya populasi penduduk Provinsi Jawa Timur. Apabila merujuk pada tabel 1.2, peningkatan partisipasi angkatan kerja ini justru diikuti dengan kenaikan indeks rasio gini Provinsi Jawa Timur yang semakin mendekati 1 (satu) yang artinya ketimpangan di Provinsi Jawa Timur semakin tinggi sehingga pembangunan ekonomi daerah semakin terhambat pula. Kemudian berdasarkan penelitian Trisa, Sedangkan kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar berbagai daerah dapat menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju

---

<sup>19</sup> Musyrifah, dkk., “Pengaruh Pdrb, Investasi, Dan Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Provinsi Kalimantan Timur,” *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Pembangunan* vo. 2, no. 1 (2024): hal. 50.

akibat dari kegiatan produktivitas tenaga kerja dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif di Provinsi Bali.<sup>20</sup>

Munculnya faktor-faktor pembangunan ekonomi suatu daerah seperti infrastruktur, investasi, pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja menjadi fenomena menarik dan penting untuk diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana hubungan dari masing-masing faktor tersebut terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur. Sehingga peneliti terdorong melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Pendidikan, Kesehatan, dan Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah pada penelitian ini membahas bagaimana pengaruh Infrastruktur, Investasi, pendidikan, Kesehatan, dan Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023 meliputi:

1. Adanya kemungkinan pengaruh Infrastruktur terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023
2. Adanya kemungkinan pengaruh investasi terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023
3. Adanya kemungkinan pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023

---

<sup>20</sup> Trisa Novia, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Pekerja Berpendidikan Sma Ke Atas, Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Bali Tahun 2016-2020,” *PARETO : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2023): hal. 11, <https://doi.org/10.32663/pareto.v5i2.2765>.

4. Adanya kemungkinan pengaruh investasi terhadap ketimpangan di Jawa Timur tahun 2019-2023
5. Adanya kemungkinan pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023
6. Adanya kemungkinan pengaruh Infrastruktur, Investasi, pendidikan, Kesehatan, dan Tenaga Kerja secara simultan terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023

### **C. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Infrastruktur berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023?
2. Apakah Investasi berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023?
3. Apakah Pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023?
4. Apakah Kesehatan berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023?
5. Apakah Tenaga Kerja berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023?
6. Apakah Infrastruktur, Investasi, pendidikan, Kesehatan, dan Tenaga Kerja berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur secara parsial terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi secara parsial terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan secara parsial terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023
4. Untuk mengetahui pengaruh kesehatan secara parsial terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023
5. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja secara parsial terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023
6. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur, investasi, pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja secara simultan terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023

## **E. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian terdiri dari dua kategori yaitu pertama untuk kepentingan ilmiah dan kedua untuk kepentingan praktis. Keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat serta menjadi pedoman secara teoritis sehingga pengetahuan ilmiah dapat

bertambah terutama di bidang pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan infrastruktur, investasi, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan serta ketimpangan.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat berupa pengembangan keilmuan khususnya mengenai masalah pengangguran di suatu daerah dan sebagai media yang memberikan referensi maupun rujukan bagi pustaka di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

### b. Bagi Pemerintah Selaku Pengambil Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dalam kaitannya mengenai fenomena Ketimpangan pembangunan ekonomi, infrastruktur, investasi, pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini juga sebagai bahan dalam mempertimbangkan pilihan strategi yang ada ketika menetapkan kebijakan dalam meningkatkan pengadaan infrastruktur, peningkatan investasi, peningkatan taraf pendidikan, peningkatan fasilitas kesehatan, memaksimalkan penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi ketimpangan wilayah.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman keilmuan secara lebih mendalam mengenai Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Pendidikan, Kesehatan, dan Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dalam konteks yang sama dengan variabel yang berbeda tentunya.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang “Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Pendidikan, Kesehatan dan Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, di mana variabel X sebagai variabel bebas (independen) terdiri dari X1 (Infrastruktur), X2 (Investasi), X3 (Pendidikan), X4 (Kesehatan), X5 (Tenaga Kerja) dan variabel Y sebagai variabel terikat (dependen) yaitu Ketimpangan.

### 2. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya dibatasi pada infrastruktur, investasi, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan ketimpangan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini juga melakukan pembatasan periode waktu yang ditetapkan yaitu hanya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

## G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan untuk mewujudkan kesatuan pandangan serta kesamaan pemikiran, maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang berkaitan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

### 1. Definisi Konseptual

Untuk meminimalisir kesalahfahaman mengenai penelitian ini, maka akan diuraikan mengenai penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Pendidikan, Kesehatan, dan Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur”, sebagai berikut:

#### a. Ketimpangan

Ketimpangan adalah suatu kondisi adanya dua golongan akibat perbedaan pendapatan yang diterima.<sup>21</sup>

#### b. Infrastruktur

Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Firdaus Finulyah and Moh Khusaini, “Pendapatan Asli Daerah, Belanja Infrastruktur Ataerhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Wilayah,” *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES* 1, no. 1 (2022): 21.

<sup>22</sup> Desak Putu Korpiyoni, “Pemanfaatan Infrastruktur Dan Ruang Pasca Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kerta, Payangan, Gianyar,” *PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa* 10, no. 2 (2021): 305, <https://doi.org/10.22225/pd.10.2.2895.297-316>.

c. Belanja Modal

Belanja Modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal lainnya.<sup>23</sup>

d. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.<sup>24</sup>

e. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu disebut juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (*life expectancy at birth*).<sup>25</sup>

f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang

---

<sup>23</sup> Kementerian Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran,” <https://jdih.kemenkeu.go.id/> diakses 6 Desember 2024.

<sup>24</sup> BPS, “Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),” <https://www.bps.go.id/> diakses 6 Desember 2024.

<sup>25</sup> BPS, “Angka Harapan Hidup (AHH),” <https://www.bps.go.id/> diakses 6 Desember 2024.

berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/provinsi/kabupaten/kota.<sup>26</sup>

## 2. Definisi Operasional

Secara operasional maka yang dimaksud dari “Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Pendidikan, Kesehatan, dan Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur”, adalah analisis yang difokuskan guna mengetahui ketimpangan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur melalui variabel atau pengaruh dari infrastruktur, investasi, pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam 6 (enam) bab dan dalam setiap bab terdapat beberapa sub bab sebagai perincian dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan pada penelitian “Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Pendidikan, Kesehatan, dan Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur” sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai bagaimana latar belakang penelitian ini dilakukan, identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan adanya penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup

---

<sup>26</sup> BPS, “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),” <https://www.bps.go.id/> diakses 6 Desember 2024.

dan keberhasilan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan penelitian.

## **2. BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang kerangka teori yang mana membahas infrastruktur, investasi, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan ketimpangan. Dilanjut dengan kajian penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

## **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh suatu data penelitian, serta teknis analisis data.

## **4. BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran hasil penelitian, dan teknik analisis data.

## **5. BAB V PEMBAHASAN**

Pembahasan ini memuat penjelasan mengenai keterkaitan antara teori dan hasil penelitian yang telah didapat. Sehingga kejelasan akan terlihat dalam pembahasan ini. Yaitu mengenai pengaruh infrastruktur, investasi, pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur

## **6. BAB VI PENUTUP**

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran